

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Sampang yang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Pulau Madura memiliki potensi yang cukup besar pada sektor Pariwisata dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dikembangkan. Tujuan dari pengembangan tersebut agar sektor Pariwisata dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memiliki kualitas, nilai (value), dan daya saing yang lebih tinggi untuk dapat bersaing dengan wilayah lain, sehingga nantinya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang, Kabupaten Sampang memiliki 13 tempat wisata yang terbagi dalam 6 wisata alam dan 7 wisata budaya. Sedangkan jumlah UMKM yang sudah terdaftar di Diskumnaker (Dinas Koperasi Usaha dan Tenaga Kerja) Sampang berjumlah 30.830 yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sampang (kabarmadura.id, 2020)

Jika dilihat dari jumlahnya, Sektor UMKM yang ada di Kabupaten Sampang menyiratkan bahwa hal itu memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bisa berkontribusi dalam menambah pendapatan daerah. Jika hal tersebut dapat dikelola dan dikembangkan dengan maksimal maka akan menciptakan UMKM yang tangguh. Namun dari jumlah Pariwisata dan UMKM tersebut, sebagian besar masih belum bisa dikelola secara maksimal. Salah satu contohnya adalah Pantai Camplong. Pantai Camplong yang dulunya dikenal sebagai salah satu maskot Kabupaten

Sampang saat ini malah mulai meredup dan jumlah pengunjung atau wisatawan nya menurun. Hal tersebut dikarenakan pihak pengelola kurang dan terkesan lambat dalam melakukan inovasi sehingga membuat adanya penurunan omset. Salah satu penyebab pihak pengelola kurang melakukan inovasi disebabkan banyaknya jalan tikus yang dibuat untuk akses masuk ke Pantai Camplong yang dibuat sendiri oleh masyarakat sehingga kebanyakan pengunjung lebih memilih masuk melalui jalan tikus tersebut dengan alasan selain tiket masuknya yang lebih murah bahkan gratis jika di hari-hari biasa, kendaraan pengunjung juga diperbolehkan masuk ke kawasan pantai. Menurut Ibu Endah Nursiskawati selaku Kasie Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Sampang mengatakan bahwa mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Sampang, sampai saat ini Sampang masih kalah jauh dari tiga kabupaten lainnya yang terdapat di Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep). Kota Sampang masih belum menemukan branding yang tepat untuk menarik wisatawan, diperlukan kerja sama dari setiap Kabupaten yang terdapat di Pulau Madura untuk meningkatkan jumlah wisatawan Madura, namun hal itu sulit terwujud karena kabupaten lainnya sangat sulit untuk diajak dalam merumuskan kebijakan mengenai upaya untuk meningkatkan wisatawan di Madura. Selain itu, pengembangan pengembangan wisata di Kabupaten Sampang masih belum optimal dikarenakan sumber modalnya masih bersifat swadaya.

Winarni dalam Ni Nyoman Sunariani dkk (2017) mengatakan bahwa UMKM setidaknya memiliki delapan permasalahan umum yang akan selalu dihadapi oleh para pelaku UMKM, diantaranya: kurangnya akses permodalan atau pendanaan, kesulitan dalam *marketing* (pemasaran), pengetahuan tentang manajemen

keuangan yang masih minim, persaingan antar usaha yang tergolong ketat, kesulitan dalam mendapat bahan baku, tingkat pengetahuan teknologi yang masih kurang (belum melek teknologi), tidak adanya ilmu keterampilan manajerial, dan tidak memiliki badan hukum. Padahal Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sudah mendirikan “Gerai Smart IKM Kabupaten Sampang” yaitu suatu tempat atau sentra yang dikhususkan kepada pelaku UMKM masyarakat setempat untuk menempatkan hasil produknya di tempat tersebut yang kemudian untuk dibantu memasarkan, dikenalkan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Namun hingga saat ini, pendirian sentra UKM tersebut belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam membantu pelaku UMKM untuk menaikkan penjualan produk-produknya.

Dari berbagai permasalahan yang ada, terdapat satu permasalahan yang sama sama dirasakan oleh UMKM dan pengelola wisata yaitu masalah permodalan, apalagi di tengah kondisi yang terjadi saat ini. Untuk itu diperlukan peran besar dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk segera mengatasi hal tersebut. Salah satu pemangku kepentingan yang dinilai mempunyai peran yang cukup besar selain pemerintah dan investor adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM), karena produknya yang berfokus di sektor tersebut (UMKM dan wisata). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat dikatakan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah, yang apabila terus dipupuk maka dapat menjadi solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya di permasalahan permodalan. Undang-Undang Nomor 1

tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pasal 1 ayat 1 menyebutkan definisi Lembaga Keuangan Mikro sebagai berikut:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan”.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mempunyai andil yang besar untuk menyalurkan kredit (pinjaman) dalam jumlah yang kecil kepada masyarakat miskin dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah agar mereka bisa mendirikan usaha atau untuk mengembangkan usahanya bagi yang sudah memiliki usaha. Namun, peranan dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Sampang belum begitu kelihatan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Kabupaten Sampang belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Pasal 1 ayat 1 tentang Lembaga Keuangan Mikro tersebut secara menyeluruh. Kurang menyentuh masyarakat desa pedalaman dan lebih banyak melaksanakan pemberian pinjaman atau pembiayaan yang lebih bersifat konsumtif dibandingkan pemberian pinjaman untuk modal merintis usaha atau mengembangkan usaha berskala mikro kepada anggota dan masyarakat, untuk pengembangan wisata dan pemberian jasa konsultasi kepada pengembangan usaha masih belum memberikan peran atau dampak secara nyata dan optimal. Padahal menurut Mubarak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada dasarnya adalah motor penggerak dan pendukung dari lumbung lumbung aktivitas usaha yang ada dikalangan masyarakat, sehingga Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mempunyai peranan yang cukup strategis untuk membantu dalam memajukan dan

mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor ekonomi masyarakat miskin (Mubarak, 2015). Didalam perkembangannya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat berguna bagi para pelaku usaha UMKM karena mempunyai sifat yang fleksibel, persyaratannya yang tidak seketat di perbankan, dan pencairan pinjaman yang lebih cepat dari perbankan.

Diantara berbagai Lembaga Keuangan Mikro yang terdapat di Kabupaten Sampang, terdapat Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki kemampuan yang cukup besar dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM yakni BPR Bank UMKM Jawa Timur karena merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang sudah berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) dan merupakan salah satu BPR terbesar di Indonesia. BPR Bank UMKM Jawa Timur diharapkan bisa menjadi salah satu upaya atau solusi bagi UMKM untuk mengatasi permasalahan yang selalu menimpa UMKM yakni kesulitan permodalan, sehingga nantinya para pelaku UMKM dapat berkembang dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari didirikannya BPR yakni untuk melayani kebutuhan masyarakat untuk bisa mengakses jasa-jasa perbankan terutama dalam hal pemberian pelayanan kredit dengan persyaratan yang tidak memberatkan pelaku UMKM serta proses dan prosedur yang mudah dan tidak merumitkan para pemohon (pelaku UMKM). Tetapi perlu adanya peran dan usaha dari para pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan dengan sebaik mungkin untuk mendukung keberhasilan dari BPR ini dalam meningkatkan dan mengatsi permasalahan modal yang selalu dieluhkan oleh UMKM. Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap BPR Bank UMKM Jawa Timur. Dalam hal ini yang akan dijadikan sebagai

objek penelitian adalah pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM dan Pariwisata melalui peranan dari pihak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan mengangkat judul **“PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN UMKM DAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SAMPANG”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasar dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, berikut ini merupakan rumusan masalah yang dapat peneliti tetapkan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran dari Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Kabupaten Sampang dalam hal mendukung pengembangan UMKM dan sektor Pariwisata?
2. Apa saja faktor penghambat dari Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Kabupaten Sampang dalam membantu pengembangan UMKM dan sektor Pariwisata?

1.3 TUJAN PENELITIAN

Berikut ini merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas:

1. Untuk mengetahui peran dari Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Kabupaten Sampang dalam membantu pengembangan UMKM dan sektor pariwisata.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Sampang dalam membantu pengembangan UMKM dan sektor pariwisata di Kabupaten Sampang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berikut ini manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah perbendaharaan keilmuan dan penelitian khususnya di bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu dalam memberikan manfaat terhadap Pemerintah setempat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terkait, para pelaku UMKM dan pengelola pariwisata untuk menemukan jawaban terkait permasalahan yang ada.

2. Manfaat Praktis

Berikut ini manfaat praktis yang bisa diperoleh dalam penelitian:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis terkait permasalahan yang diteliti yaitu tentang peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap pengembangan pariwisata dan UMKM. Serta sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
- 2) Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu dan gambaran tentang realita di lapangan sehingga keilmuan yang didapat tidak hanya sebatas teori belaka melainkan juga secara praktek di lapangan.

- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran dari Lembaga Keuangan Mikro dalam membantu perekonomian masyarakat.
- 4) Bagi lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membantu perekonomian masyarakat.